

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK

Ilham Mohammad Iqbal
Universitas Pancasila
Email: cookiees@rocketmail.com

Abstract: *The presence of small-scale industries are enormous role in providing employment and improving social welfare. Industry has a small role and a very important contribution to the Indonesian economy, besides ketch medium industry is highly resistant to the crisis. The state of the world economy is currently highly uncertain, with swept gobal crisis that caused the destruction of the economy of developed countries, Trade fluktuatifnya free and global economy, it does not provide a significant adverse effect on small and medium industries. Small and medium industries is currently experiencing a growth phase due to a lot of parties that support the creation of small and medium industries such as CSR from private companies and the government through grants, incentives, and the exhibition is free. If the activity is carried out in a sustainable manner, then Indonesia will be developed in the future.*

Keywords: *welfare, crisis, free trade, growth*

Abstrak: *Keberadaan industri kecil sangatlah besar peranannya dalam penyediaan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri kecil memiliki peranan dan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, selain itu industri keci menengah sangat tahan terhadap krisis. Keadaan perekonomian dunia saat ini sangat tidak menentu, dengan melandanya krisis gobal yang menyebabkan hancurnya perekonomian negara-negara maju, perdagangan bebas dan fluktuatifnya perekonomian global, hal tersebut tidak memberikan pengaruh buruk yang signifikan terhadap industri kecil menengah. Industri kecil menengah saat ini sedang mengalami fase pertumbuhan karena banyak pihak yang mendukung terciptanya industri kecil menengah seperti CSR dari perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintah melalui hibah, insentif, dan pameran gratis. Apabila kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan, maka Indonesia akan menjadi negara maju di masa mendatang.*

Kata kunci : *kesejahteraan, krisis, perdagangan bebas, pertumbuhan*

PENDAHULUAN

Industri Kecil Menengah memegang peranan kuat dalam perekonomian terbukti ketika terjadinya krisis ekonomi tahun 1997,

Industri Kecil Menengah masih tetap bertahan, berbeda dengan industri besar banyak yang gulung tikar. Sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan industri kecil.

Persoalan persaingan bebas, pengaruh teknologi dan informasi, serta tuntutan pasar global yang semakin kritis membuat dunia usaha yang mampu bertahan adalah mereka-mereka yang memiliki daya saing tinggi. Pengaruh dari persaingan global tersebut tidak dapat dipungkiri juga merambah dan membawa implikasi kepada dunia usaha/industry. Sudah menjadi rahasia umum bahwa struktur dan pondasi ekonomi Indonesia yang belum mapan, turut member andil dalam membuat krisis ekonomi Indonesia seperti tanpa ujung penyelesaian yang jelas. Implikasi tersebut tidak terkecuali juga mempengaruhi kinerja Industri Kecil dan Menengah. Dinamika tuntutan tersebut mengharuskan Industri Kecil dan Menengah untuk mampu mempunyai perilaku positif sehingga akan membentuk perilaku kinerja yang optimal sehingga dibutuhkan upaya pemberdayaan terhadap Industri Kecil dan Menengah. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengindikasikan adanya keberpihakan untuk mempercepat proses pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

Konsep dan Definisi

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling).

Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon), misalnya perusahaan penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/gabah petani dengan balas jasa tertentu.

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu :

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)
2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)

4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang) Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.

Klasifikasi Industri

Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri ini adalah klasifikasi yang berdasar kepada *INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ALL ECONOMIC ACTIVITIES (ISIC) revisi 3*, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama *KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)*.

Kode baku lapangan usaha suatu perusahaan industri ditentukan berdasarkan produksi utamanya, yaitu jenis komoditi yang dihasilkan dengan nilai paling besar. Apabila suatu perusahaan industri menghasilkan 2 jenis komoditi atau lebih dengan nilai yang sama maka produksi utama adalah komoditi yang dihasilkan dengan kuantitas terbesar.

Golongan Pokok

- 15 Makanan dan minuman.
- 16 Tembakau.
- 17 Tekstil.
- 18 Pakaian jadi.
- 19 Kulit dan barang dari kulit.
- 20 Kayu, barang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang-barang
- 22 anyaman.

- 23 Kertas dan barang dari kertas
- 24 Penerbitan, percetakan dan reproduksi
- 25 media rekaman.
- 26 Batubara, pengilangan minyak murni
- 27 pengolahan gas bumi, barang-barang
- 28 dari hasil pengilangan minyak bumi
- 29 dan bahan bakar nuklir.
- 30 Kimia dan barang-barang dari bahan
- 31 kimia.
- 32 Karet dan barang-barang dari bahan
- 33 kimia.
- 34 Barang galian bukan logam.
- 35 Logam dasar.
- 36 Barang-barang dari logam kecuali
- 37 mesin dan peralatannya.
Mesin dan perlengkapannya
Mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data.
Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya.
Radio, televisi, dan peralatan komunikasi, serta perlengkapannya.
Peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam, dan lonceng.
Kendaraan bermotor.
Alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
Furnitur dan industri pengolahan lainnya.
Daur ulang.

Pelaksanaan survei industri ini dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan (*questionnaire*) kepada semua perusahaan industri yang tergolong besar dan sedang yang tercatat dalam direktori BPS. Jadi pencacahan dalam survei ini dilakukan secara lengkap.

Jumlah Tenaga Kerja

Konsep dan Definisi

Adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang

dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar

Pekerja Produksi adalah pekerja yang langsung bekerja dalam proses produksi atau berhubungan dengan itu, termasuk pekerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.

Pekerja lainnya adalah pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, pekerja ini biasanya sebagai pekerja pendukung perusahaan, seperti manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Didalam Pasal 2 PP tersebut disebutkan bahwa salah satu dari maksud dan tujuan kegiatan Perjan, Perum, dan Persero adalah turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi. Pada masa itu perseroan milik pemerintah yang melaksanakan kegiatan pembinaan usaha kecil dan masyarakat sering disebut-sebut sebagai / dengan predikat "Bapak angkat usaha kecil / industri kecil". Baru setelah muncul Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) No. 1232 / KMK.013 / 1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi Melalui BUMN, nama program tersebut dikenal dengan "Program Pegelkop".

Didalam Kepmenkeu No. 1232 / KMK.013 / 1989 disebutkan bahwa BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi (Pasal 2). Pembinaan diberikan dalam bentuk peningkatan kemampuan manajerial, teknik berproduksi, peningkatan kemampuan modal kerja, kemampuan pemasaran dan pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan (Pasal 3). Kepmenkeu No. 1232 Tahun 1989 tersebut juga secara eksplisit menegaskan bahwa pembiayaan untuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh BUMN diambil / disediakan dari bagian laba BUMN yang bersangkutan, dengan besaran antara 1%-5% setiap tahun dari laba setelah pajak (Pasal 4). Dengan Kepmenkeu No. 306 / KMK.013 / 1991 Tanggal 20 Maret 1991, yang merupakan penyempurnaan Kepmenkeu No. 1232 / KMK.013 / 1989, diberikan batasan maksimal pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Status dana pembinaan dapat ditetapkan sebagai hibah atau pinjaman kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi (Pasal 7 ayat 2). Pelaksanaan pembinaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi BUMN yang bersangkutan (Pasal 10).

Berdasarkan Kepmenkeu No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN, nama program diubah menjadi "PUKK". Pasal 2 Kepmenkeu No. 316 Tahun 1994 tersebut ditegaskan bahwa BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi. Sumber dana pembinaan berasal dari bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar antara 1%-5% dari seluruh laba

perusahaan setelah pajak. Bentuk pembinaan berupa pendidikan, pelatihan, penelitian dan perdagangan, untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen, serta teknik berproduksi, jaminan kredit dan penyertaan pada perusahaan modal venturayang membantu pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.

Pada tahun 1995 diterbitkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang didalamnya terkandung komitmen secara eksplisit yakni : pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan teknologi (Pasal 14). Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan bagi pengembangan usaha kecil meliputi : kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain (Pasal 21).

Kurun waktu berikutnya lahir PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, yang didalam Penjelasan Pasal 10 huruf e ditegaskan bahwa penyediaan dana dilakukan oleh departemen teknis, kantor menteri Negara, pemerintah daerah (pemda), BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran perusahaan sesuai dengan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di masing-masing sektor, sub sektor, pemda, BUMN, dan BUMD yang bersangkutan. Hingga pada akhirnya, tahun 2003 terbit UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang

kemudian khusus menyangkut TJSL dijabarkan lebih lanjut dengan Kepmen.BUMN No. Kep-236/MBU/2003 juncto Permen.BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Produk CSR

Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

Contoh: Program Mahasiswa Wirausaha merupakan hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang akan dipergunakan untuk modal usaha kepada para mahasiswa.

Insentif

Menurut Pangabean (2002 : 93, Insentif adalah [kompensasi](#) yang mengaitkan gaji dengan [produktivitas](#). Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.

Contoh: Perusahaan industri kecil menengah (IKM) yang memanfaatkan jasa konsultan IKM diberikan insentif sebesar 90 persen dari total biaya jasa konsultasi. Demikian isi Peraturan Menteri Perindustrian No.37/M-

IND/PER/6/2006 tentang pengembangan jasa konsultasi industri kecil dan menengah (IKM) tertanggal 27 Juni 2006.

SIMPULAN

Apabila pembinaan dan pengembangan terhadap Industri Kecil berhasil dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan bukan tidak mungkin dimasa yang akan datang perekonomian Indonesia akan kuat dalam menghadapi tantangan global.

Wikipedia, (2012). *Hibah*

Result. <http://id.wikipedia.org/wiki/Hibah>

Diakses 21 November 2012

DIKTI, (2012). *Pedoman Program Mahasiswa Wirausaha*

Result.

[www.dikti.go.id/files/Belmawa/Pedoman_Program_Mahasiswa_Wirausaha_\(PMW\).Pdf](http://www.dikti.go.id/files/Belmawa/Pedoman_Program_Mahasiswa_Wirausaha_(PMW).Pdf)

Diakses 21 November 2012

Widiyanti, Arin, (2006). *IKM dapat Insentif Jasa Konsultan*

Result.

<http://finance.detik.com/read/2006/06/30/165020/626956/4/ikm-dapat-insentif-jasa-konsultan>

Diakses 21 November 2012

Biro Pusat Statistik, (2012). *Konsep Industri*

Result.

http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=2&id_subyek=09

Diakses 4 Desember 201

DAFTAR PUSTAKA

Ferdian, Anas, (2012). *Menelusuri Jejak CSR PADA BUMN*

Result. <http://menelusuri-jejak-csr-pada-bumn.blogspot.com/>

Diakses 20 November 201

Kumorotomo, W, (2012). *Perubahan Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM*

Result. <https://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/09/perubahan-paradigma-peran-pemerintah-dlm-pemberdayaan-koperasi-umkm.pdf>

Diakses 21 November 2012